

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amiruddin Hasbi, *perjuangan ulama Aceh di tengah konflik*, Caninnets Press, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka raya, Jakarta.
- Hendratno, Edie toet, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi ,dan Federalisme*, graha ilmu bersama Universitas Pancasila, Yogyakarta.
- Kusnardi, Moh dan Bintang Saragih, 2004, *Ilmu Negara*, edisi revisi, Gaya media Pratama, Jakarta.
- Moh.Mahfud M.D, 2001, *Dasar dan struktur ketataNegaraan Indonesia*, UII Pres. Yogyakarta.
- Manan Bagir, 2002, *Menyongsong fajar otonomi daerah*, , Pusat studi hukum fakultas hukum UII, Yogyakarta.
- Mursyidan, Fery Baldan, 2007, *Pondasi Menuju Perdamaian Abadi (catatan Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh)*, Suara Bebas, Jakarta.
- Muhammad abdulkdir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Ratnawati Tri, 2009, *pemekaran daerah dan beberapa isu terseleksi*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*, Indepth Publising. Bandar Lampung.
- Soehino, 2004, *Ilmu Negara*, liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.

Sunarno, Siswanto , 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.

Strong,C.F. 1952, *Modern Political Constitution :an Introduction to the comparatif study of their history and existing form*, diterjemahkan oleh Nusa media.Jakarta.

Sumantri, Sri M, *Bentuk Negara dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945*,Ghalia Indonesia,Jakarta.

## **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4134).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan pusat dan daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. (lembaran Negara nomor 117).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang pemilihan presiden. (lembaran Negara nomor 93).

## **Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_istimewa](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_istimewa)

[www.nad.go.id](http://www.nad.go.id)